



Sempat Ujian di Luar Kelas

■ Buntut dari Siswa Belum Bayar SPP

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah siswa di SD Muhammadiyah Sokonandi harus mengikuti ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) di luar kelas. Pelaksanaan PAT di ruangan terpisah dari siswa lainnya ini berlaku untuk

siswa yang masih menung-gak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah.

Kebijakan ini menuai protes dari orangtua murid. S, salah satu siswa SD Muhammadiyah Sokonandi, Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta mengatakan, dirinya bersama belasan siswa lain sempat mengerjakan ujian di musala sekolahnya pada hari pertama dan kedua. Hal ini

karena orang tua S masih belum membayar SPP sekolah selama beberapa waktu terakhir.

"Saya merasa kesusah-an saat mengerjakan soal karena harus tengkurap. Kalau di kelas pakat meja jadi lebih enak (mengerjakan soal ujiannya)," kata S kepada *Tribun Jogja*, Jumat (2/6).

● ke halaman 14

STORY HIGHLIGHT

- Sejumlah siswa SD Muhammadiyah Sokonandi mengikuti ujian PAT di luar kelas lantaran belum membayar SPP
- Pihak sekolah menyatakan kebijakan itu adalah bagian dari penertiban administrasi dan sudah diputuskan dalam rapat
- Dinas Pendidikan Kota Yogya akan melakukan klarifikasi informasi pemisahan ruangan untuk ujian ini

Sempat Ujian di Luar Kelas

● Sambungan Hal 13

Pelaksanaan ujian di musala ini, kata dia, dilakukan pada hari pertama dan kedua. Pada hari pertama ujian ada sekitar 15-an orang yang harus mengerjakan di tempat ibadah itu.

Sementara, pada hari kedua jumlahnya tinggal sekitar enam orang.

"Hari ketiga ini (kemarin), kami berlima mengerjakan di ruang kaca. Terpisah dari kawan-kawan lainnya," katanya.

Meski harus mengerjakan ujian di ruangan terpisah dari kawan-kawannya, S mengaku tetap biasa saja. Meskipun, dirinya mengaku sempat kaget karena

dipanggil guru kelasnya untuk mengerjakan di musala dengan alasan belum membayar SPP. "Biasa saja sih. Tapi, pengennya tetap bisa mengerjakan di kelas bersama dengan teman-teman," katanya.

Tuai protes

Kebijakan untuk memisahkan siswa yang masih belum membayar SPP untuk mengerjakan ujian di ruangan lain menuai protes dari salah satu orangtua murid. Kebijakan sekolah ini dinilai tidak tepat dan merugikan siswa karena akan berdampak pada psikologis anak.

Salah satu orang tua siswa, sebut saja Budi, menyatakan kebijakan ini justru akan membuat siswa menjadi malu dan tertekan secara psikologis. "Dampaknya, memengaruhi hasil ujian dan juga penilaiannya. Nu-

lis dan menjawabnya juga tidak di meja semestinya, tapi di lantai," ujar Budi.

Dia mengaku cukup kaget begitu mendapatkan laporan dari anaknya mengenai pengerjaan ujian di musala ini. Hal ini pun, kata dia, baru ini terjadi di sekolah tempat anaknya menimba ilmu tersebut.

"Selama ini tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini. Selesai UKK, anak saya agak memerah matanya karena disendirikan tempat ujiannya. Ini jelas sangat tidak manusiawi, dan tidak mencerminkan institusi pendidikan yang menjunjung tinggi kesantunan dan kebaikan," jelasnya. Diakukannya, dari sisi administrasi memang dirinya belum membayar uang SPP untuk pendidikan anaknya. Hanya saja, ada beberapa hal

yang mendasari dirinya menunggak membayar uang sekolah bulanan itu. Di antaranya adalah kebijakan sekolah untuk membayar beragam hal terkesan dipaksakan.

"Contohnya, catering diwajibkan dari sekolah. Harganya pun mahal. Seharusnya, anak bebas untuk membawa bekal dari rumah. Ini baru satu contoh kekecewaan saya pada sekolah sejak anak saya masuk," jelasnya.

Dia pun mengaku sudah menerima surat teguran dari sekolah mengenai tunggakan SPP tersebut sebanyak satu kali. "Memang saya tidak (memenuhi panggilan) ke sekolah dengan adanya surat tersebut. Saya juga berencana untuk mengeluarkan anak saya dari sekolah ini," katanya. (ais)

Bagian dari Tertib Administrasi

PIHAK SD Muhammadiyah Sokonandi dan komite sekolah menyatakan kebijakan pemisahan ruang untuk siswa yang menunggak administrasi sekolah adalah bagian dari penertiban administrasi. Mereka menyebut pemisahan ruangan bagi siswa yang orangtuanya

belum membayar kewajiban administrasi sekolah sudah diputuskan dalam rapat.

"Kami melakukan pengurangan hak bagi siswa yang orangtuanya belum memenuhi kewajibannya.

• ke halaman 14

Bagian dari Tertib Administrasi

• Sambungan Hal 13

Namun, untuk pelaksanaan ujian tetap dalam waktu yang sama dan materi soal sama, namun ruangnya berbeda," jelas Ketua Komite SD Muhammadiyah Sokonandi, H. Zaed Junaldi saat ditemui *Tribun Jogja*, Jumat (2/6).

Zaed mengakui ada sebagian siswa yang terpaksa melaksanakan ujian PAT di musala. Namun, dia mengklaim pelaksanaan di musala ini pada hari pertama PAT, yakni 30 Mei lalu. Sementara, hari kedua hingga hari terakhir PAT yang dijadwalkan hingga tanggal 8 Juni dan 10 Juni, siswa melaksa-

nakan di ruangan standar.

"Ruangan saat ini yang digunakan standar seperti kelas, namun berbeda ruangan dengan siswa lainnya," jelasnya.

Dia menambahkan, pengurangan hak ini juga sesuai petunjuk dinas terkait dan sekolah tidak melangkah sendiri. Pihaknya pun mengklaim sudah ada klarifikasi dari dinas terkait dan ada petunjuk pelaksanaannya.

Kebijakan untuk memisahkan siswa yang orangtuanya tidak tertib administrasi mulai dari membayar infak, SPP, dan uang lainnya ini adalah keputusan dari *stake holder* sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, dan pimpinan cabang Muhammadiyah.

Proses penagihan administrasi secara intensif ini di-

laksanakan pada sejumlah orangtua siswa untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini dengan tujuan untuk memperbaiki keuangan sekolah. Bahkan, pihak *stake holder* pun telah melaksanakan penagihan sesuai dengan prosedur.

"Kami telah melayangkan surat peringatan pada orangtua yang menunggak selama empat kali. Namun, sama sekali tidak diindahkan. Sehingga, terjadilah pengurangan hak ini. Harapan kami tidak ada orangtua yang *ngoyel*," jelasnya.

Dari catatannya, masih ada sekitar 31 siswa yang orangtuanya belum menyelesaikan administrasi. Bahkan, sebelum ada peringatan, ada sekitar 83 siswa yang tercatat masih belum menyelesaikan administrasi. Jumlah tersebut tersebar dari kelas 1 hingga kelas 5.

Komunikasi

Pihaknya berharap, jika memang ada orangtua yang tidak mampu untuk melunasi kewajiban bisa disertai dengan komunikasi pada pihak sekolah untuk memohon kebijakan. Selain itu juga ada surat pernyataan tidak mampu yang disertai dari keterangan RT/RW dan jenjang

lainnya.

Menurutnya, sekolah pun siap untuk menggratiskan pendidikan jika memang ada pernyataan dan permohonan bagi orangtua siswa yang tidak mampu. Namun faktanya, kata Zaed, sebenarnya banyak orangtua siswa yang mampu namun memang tidak membayar.

"Ini adalah orangtua yang nakal dan tidak ada iktikad baik. Sekolah pasti memahani etika dan norma bukan hanya mengacu pada bisnis semata," ulasnya.

Kepala SD Muhammadiyah Sokonandi, Hadi Nuryanto, mengaku ada banyak orangtua yang sebenarnya mampu namun tidak mengurus administrasi. Proses administrasi yang tidak tertib ini pun memiliki kronologi yang panjang. "Anak-anak juga sebenarnya *enjoy* saat melaksanakan ujian di musala. Mereka pakai *clip board* sebagai alas," jelasnya.

Dia pun menyebut, ada sebagian orangtua yang menunggak SPP sejak anaknya masuk sekolah hingga ada yang sekolah hingga kelas 4 dan 5. Hal itulah yang kemudian harus dikomunikasikan agar ada penyelesaian yang baik. (als)

Instansi	Nilai Ber	Uraian	Uraian Lanjut

Pemisahan Ruang Tak Tepat

DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta menilai langkah yang diambil SD Muhammadiyah Sokonandi untuk memisahkan ruang ujian bagi siswa yang belum membayar SPP tidak tepat. Pihak dinas terkait pun akan melakukan klarifikasi informasi pemisahan ruangan untuk ujian ini.

"Kami menilai (pelaksanaan ujian di luar kelas) tidak tepat," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Edy Heri Susana, Jumat (2/6).

● ke halaman 14

Pemisahan Ruang Tak Tepat

● Sambungan Hal 13

Edy mengaku, pihaknya akan segera mengklarifikasi dan mengonfirmasi informasi ini dengan mengirimkan pengawas sekolah. Pengawas sekolah inilah yang nantinya akan

mengorek data terkait dengan kasus tersebut.

Pihaknya hingga kini belum bisa memberikan keterangan terkait tindakan yang akan diambil untuk menyikapi persoalan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil konfirmasi dan klarifikasi oleh pengawas sekolah. "Hasil ini sebagai dasar mengambil langkah sebelumnya," tegasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005